

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**BAPPEDA**  
KOTA MAGELANG



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 090.24/218/112 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA MAGELANG TAHUN 2022**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah yang integrative, terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan daerah guna pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 yang telah diverifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebelum ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Magelang tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 18 Agustus 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR 030.21/218/112 TAHUN 2022  
 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KOTA MAGELANG TAHUN 2022

DAFTAR PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENCANA KERJA  
 PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	180.584.598.069
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	441.794.367.216
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	65.967.535.357
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	20.675.637.310
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	14.178.862.239
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	5.035.271.047
7	Dinas Sosial Kota Magelang	8.077.494.720
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	11.171.454.799
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	34.663.436.247
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	6.873.327.719
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	14.174.866.051
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	20.584.983.701
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	13.201.484.205
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	7.350.554.348
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	15.962.449.533
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	6.946.125.873

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	32.799.633.296
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	34.051.833.252
20	Sekretariat Daerah Kota Magelang	50.633.252.040
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.572.056.722
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	23.922.904.958
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	18.761.596.796
24	Inspektorat Daerah Kota Magelang	6.896.271.331
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	9.267.897.829
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	60.706.105.109
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	17.341.867.701
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	6.602.776.323
	TOTAL	1.160.163.127.391

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022



## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>BAB I - 1</b>
A. Latar Belakang .....	BAB I - 1
B. Landasan Hukum .....	BAB I - 8
C. Maksud dan Tujuan .....	BAB I - 11
D. Sistematika .....	BAB I - 11
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN           PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA           MAGELANG TAHUN 2021 .....</b>	<b>BAB II - 1</b>
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I .....	BAB II - 1
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	BAB II - 15
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	BAB II - 20
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT           DAERAH .....</b>	<b>BAB III - 1</b>
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	BAB III - 1
B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan .....	BAB III - 6

C. Program dan Kegiatan .....	BAB III - 9
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>BAB IV - 1</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>BAB V - 1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1		

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11) UU Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya Pada pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD” serta juga terdapat dalam Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 124. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana tercantum di dalam pasal 310 ayat (2).

Mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Dokumen RPJP ini menjadi pedoman dokumen RPJMD yang disusun Pemerintah Kota Magelang. Dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, dokumen RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, dokumen RPJMD Kota Magelang Tahap ke III (Tahun 2016-2021) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016, dan RPJMD Tahap ke IV (Tahun 2021-2026) yang sedang dalam proses penyusunan.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan untuk periode waktu 1 (satu) tahun yaitu RKPD yang disusun setiap tahun. RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun tahun 2021 untuk dilaksanakan di tahun 2022. Mengingat saat penyusunan RKPD Tahun 2022 bersamaan dengan penyusunan RPJMD Tahap IV maka dapat dikatakan bahwa RKPD Tahun 2022 disusun pada masa transisi pelaksanaan RPJMD Tahap III ke Tahap IV. Oleh karena itu tema tahun perencanaannya adalah “AKOMODATIF DAN TRANSITIF”. Tema ini untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh untuk mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, SDM berkualitas dan mandiri serta mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani. Disamping itu juga mengakomodir Visi Misi Walikota terpilih yang akan dijabarkan dan dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan kegiatan

penyusunan RKPD, KUA PPAS serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan rancangan APBD. Dengan kata lain Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun pada tahun 2020 dan dilaksanakan pada tahun 2021.

Adapun Perubahan RKPD tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD Tahun 2022 ini akan menjadi pedoman bagi Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Disamping itu Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai salah satu perangkat daerah dari Pemerintah Kota Magelang berkewajiban menyesuaikan Rencana Kerja Tahun 2022 dalam upaya mendukung program dan kegiatan Pemerintah Kota Magelang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja

perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan alternative yaitu program dan kegiatan OPD, lintas OPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan.
2. Pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Program dan kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra OPD dengan kriteria sebagai berikut:
  - a) Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
  - b) Dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra Perangkat Daerah;
  - c) Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau;
  - d) Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

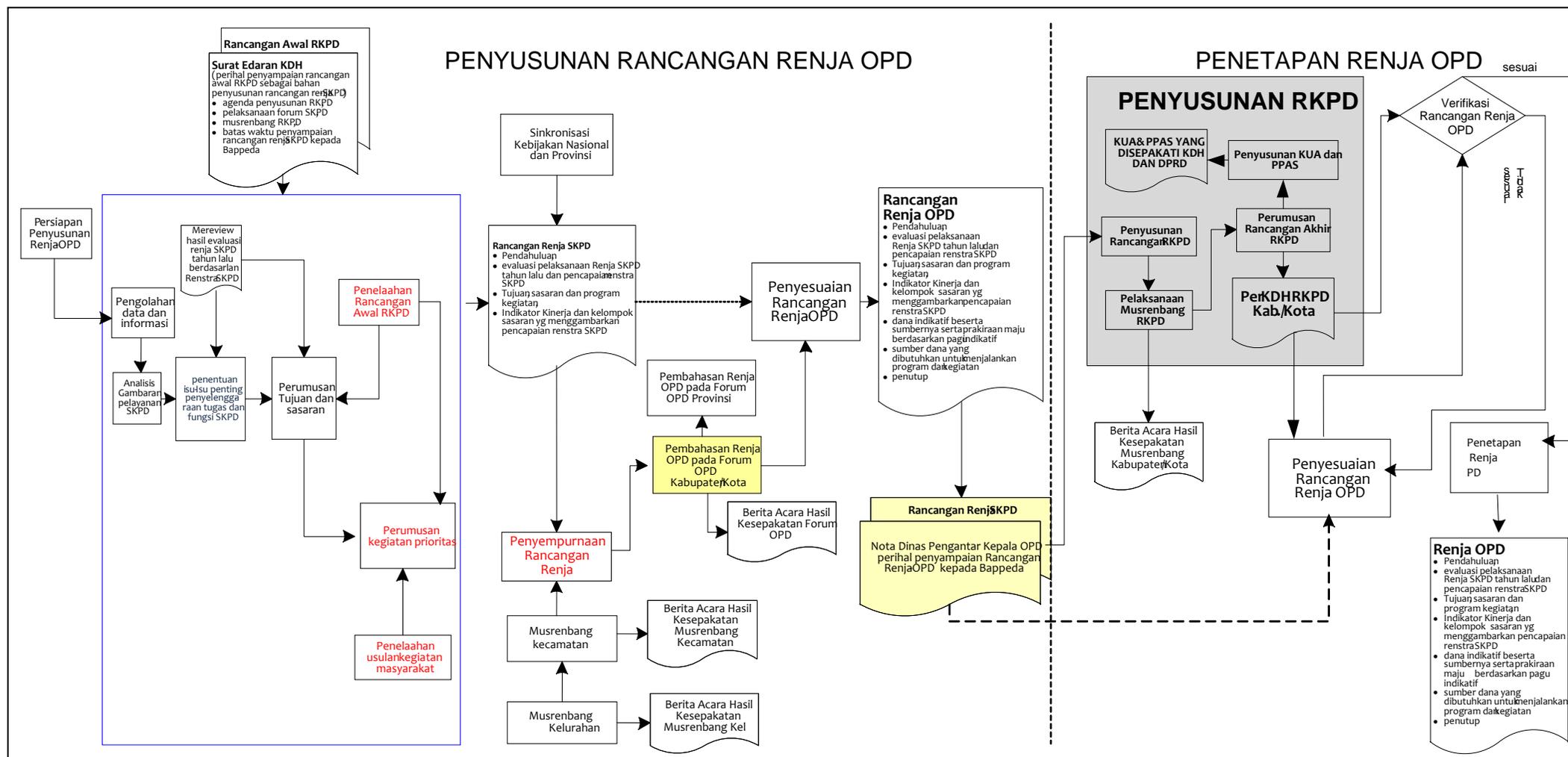
Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Magelang Tahun 2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan perubahan renja

perangkat daerah ditetapkan menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022.

Adapun proses Perubahan Renja Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah. Secara lebih detail proses penyusunan renja perangkat daerah dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022



## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022.

#### **2. Tujuan**

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2022 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Capaian Indikator  
sampai dengan Semester I

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi  
Perangkat Daerah

D. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

## BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN**  
**2022**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 dan Capaian Indikator sampai dengan Semester I**

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 sampai dengan Semester I adalah sebagai berikut:

1. Dari 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan yang dianggarkan pada Tahun 2022, secara realisasi fisik yang direncanakan dilaksanakan pada semester I belum dapat berjalan sesuai perencanaan yang dibuat saat menyusun anggaran kas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:
  - Realisasi fisik melebihi target : 20 sub kegiatan
  - Realisasi fisik sama dengan target : 5 sub kegiatan
  - Realisasi fisik kurang dari target : 20 sub kegiatan
2. Jika dilihat dari realisasi keuangan untuk Tahun 2022 sampai dengan triwulan II baru mencapai 32,85% lebih rendah dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 37,55%. Adapun realisasi fisik sudah mencapai 50,08% dimana sudah melampaui target fisik yang harus dicapai yaitu sebesar 47,79%.
3. Adapun faktor penyebab tidak/kurang tercapainya target hasil/keluaran untuk sub kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan:
  - Ketatnya jadwal kegiatan pada badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sehingga ada beberapa sub kegiatan yang pelaksanaannya mundur dari yang direncanakan.
  - Keterbatasan SDM aparatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan perkiraan pencapaian tahun berjalan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MAGELANG S/D TAHUN 2022

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERENCANAAN									
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%	-	100%	100%	100%	81%	100%	100%
A	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi kinerja PD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	33.3%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	13 dokumen	7 dokumen	53.84%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	-	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	50%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		perangkat daerah								
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	-	10 Paket	10 Paket	100%	12 paket	6 paket	50%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 paket	-	42 paket	42 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	-	2 paket	2 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	12 paket	6 paket	50%
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 paket	-	26 paket	26 paket	100%	12 paket	6 paket	50%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	1 laporan	16.67%
7	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	88 laporan	-	51 laporan	51 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=(7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=(5+7+9)</b>	<b>11=(10/4)</b>
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	4 unit	4 unit	100%	9 unit	1 unit	11.11%
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	6 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	0%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	0%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	-	8 laporan	8 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	-	15 unit	15 unit	100%	18 unit	9 unit	50%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	9 unit	-	9 unit	9 unit	100%	10 unit	5 unit	50%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Operasional atau Lapangan	Perizinannya								
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	-	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	-	10 unit	10 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	3 unit	3 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	95,89%	-				10,27%		
A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase elemen pembangunan yang terlibat	85%	-	100%	100%	100%	83%	100%	100%
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	-	2 berita acara	2 berita acara	100%	1 berita acara	1 berita acara	100%
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 berita acara	-	14 berita acara	14 berita acara	100%	5 berita acara	5 berita acara	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	-	2 berita acara	2 berita acara	100%	1 berita acara	1 berita acara	100%
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
B	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	96%	-	100%	100%	100%	96%	100%	100%
1	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	-	2 buku	2 buku	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	85%	-	100%	100%	100%	65%	100%	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pembangunan								
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	-	100%	100%	100%	75%	89.53%	119.37%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	-	100%	100%	100%	67%	89.58%	133.70%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	-	100%	100%	100%	67%	68.29%	101,92%
A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	5 dokumen	1 dokumen	20%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	1 dokumen	16.67%
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	0%
B	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	1 dokumen	25%
4	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	6 dokumen	2 dokumen	33.33%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian								
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	6 dokumen	2 dokumen	33.33%
C	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		-	100%	66.6%	66.6%	100%	100%	100%
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	9 dokumen	2 dokumen	22.22%
5	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	-	-	0%
	PENELITIAN DAN									

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PENGEMBANGAN									
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	-	100%	100%	100%	0%	0%	0%
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	100%	-	100%	100%	100%	24%	0%	0%
A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	-	100%	100%	100%	27.78%	100%	100%
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	100%
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 laporan	100%
3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan	2 rekomendasi	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	0 laporan	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan								
D	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan		-	100%	100%	100%	30%	100%	100%
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	-	8 produk	8 produk	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	-	-	-	0%	2 laporan	0 laporan	0%
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	3 laporan	0 laporan	0%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	2 laporan	1 laporan	50%

## B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026, maka kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sesuai tugas dan fungsi tercermin pada pencapaian atas indikator kinerja. Karena Pencapaian target kinerja pada tahun sebelumnya didasarkan pada Renstra 2016 – 2021, maka pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang disajikan pada tabel 2.2 yang berisi capaian kinerja pada 3 tahun terakhir RPJMD 2016 – 2021, dan Tabel 2.3 yang berisi capaian kinerja sampai dengan semester 1 Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel Error! No text of specified style in document..2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2019-2021**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	-	-	95%	98%	100%	72,29 %	59,04 %	85,54%	
2	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	-	-	65%	68%	70%	81,48 %	80,34 %	114,77 %	
3	Cakupan	-	-	65	70%	75%	75%	59,10	69,10%	

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif							%		
4	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	-	-	100%	100%	100%	100%	99,36%	81,82%	

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi capaian kinerja Bappeda tertinggi pada indikator presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD yaitu sebesar 114,77%. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat sebagai subjek pembangunan semakin meningkat. Sedangkan indikator yang terendah yaitu pada cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu sebesar 69,10%. Meski demikian, seiring meningkatnya peran aktif masyarakat, diharapkan di tahun mendatang kualitas perencanaan semakin baik.

Adapun capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan semester 1 Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel Error! No text of specified style in document..1**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022 Semester 1
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(10)
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	-	-	79,51%	53,12%
2	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 28,5	-	-	67,85%	53,57%
3	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	-	-	65,85%	35,90%
4	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	-	17,02%	8,51%
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	-	-	24%	0%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa capaian kinerja pada semester 1 hanya ada 2 indikator yang capaian realisasinya diatas 50%, yaitu kualitas perencanaan pembangunan daerah sebesar 53,12% dan persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 28,5 sebesar 53,57%. Dengan kata lain kinerja capaian berdasarkan target Tahun 2022 berturut – turut sebesar 66,82% dan 78,95%. Sedangkan capaian tertendah pada indikator bidang penelitian dan pengembangan yaitu presentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 8,51% dan persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi masih 0%. Faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi capaian kinerja pada kedua indikator tersebut adalah sub kegiatan tersebut berkaitan dengan jadwal pelaksanaan yang mengikuti regulasi pemerintah Pusat.

### **C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan utama dalam proses perencanaan adalah kurangnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Magelang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang sudah cukup baik. Namun ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja. Perlu kerja keras untuk mencapai target indikator tersebut pada akhir tahun RPJMD. Menurunnya pandemi Covid 19 ditahun 2022 diharapkan berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian target kinerja.

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke dapan antara lain:

1. Masih iperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah di tetapkan pada awal periode perencanaan;
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
4. Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data

sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;

5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 dengan tema *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*. Sasaran pembangunannya adalah *mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*.

Perhatian utama adalah kepada **7 (tujuh)** Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai penerjemahan 4 (empat) pilar RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama periode terakhir RPJPN 2005-2025; serta **5 (lima)** arahan utama Presiden RI terkait fokus Pembangunan Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Tema RKP Tahun 2022 adalah Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif. Tema ini masih berfokus pada pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipedomani dalam menyusun RKPD Kota Magelang Tahun 2022 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**” dengan prioritas daerah yang diarahkan pada:

- a. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
- b. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

- c. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

## **B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “*Magelang Maju, Sehat dan Bahagia*”. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

### **1. Mewujudkan Masyarakat Yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat.

Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga.

Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga.

Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang

menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi.

Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

## 2. **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus

menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

### **3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif**

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (human intelligence) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

### **4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan**

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

#### **5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:**

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewadahi tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalannya pertukaran informasi secara masal.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewadahi kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2021-2026 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan komponen visi Magelang sebagai Kota yang Maju, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi 3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif”

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 3 tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**”.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan

- 2) Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
- 3) Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel Error! No text of specified style in document..2

**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Hitung	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	$\sum ((40*\text{persentase perangat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal } 28,5)/100) + ((60*\text{Persentase ketercapaian target daerah}/100))$	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%	85,37%
1.1		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 28,5	$\frac{\sum \text{PD dengan LHE AKIP Komponen Perencanaan } 28,5}{\sum \text{Target PD dengan LHE AKIP Komponen Perencanaan } 28,5} \times 100\%$	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
1.2		Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	$\frac{\sum \text{indikator tujuan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\sum \text{seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%	75,61%
1.3		Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	$\frac{\sum \text{kelitbangan dalam RKP}}{\sum \text{kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	$\sum \text{Realisasi indicator program 1 (Kelitbangan) + Realisasi indicator program 2 (inovasi)}$	26,10%	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%	68,44%

### **C. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan yang disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang. Beberapa program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh peraturan tentang perencanaan pembangunan adalah penyusunan dokumen RKPD dari pelaksanaan musrenbang sampai dengan penyusunan perwal RKPD. Selain itu, mulai tahun 2013 disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan tahun berkenaan.

Program – program yang tercermin dan menjadi pertimbangan di dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021 telah mempertimbangkan beberapa hal yang prioritas dan kebijakan nasional dan kebijakan daerah selain beberapa program kegiatan rutin yang dilaksanakan semua OPD dan menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal terkait prioritas dan kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan program kegiatan di dalam Renja 2021, seperti: a). pencapaian visi misi kepala daerah, b). pencapaian SDGs, c). pengentasan kemiskinan, d). pendayagunaan potensi ekonomi daerah , dan kebijakan atau prioritas lainnya. Hal – hal tersebut di atas tercermin di dalam program dan kegiatan yang terdapat di dalam Renja 2021.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan nomenklatur program kegiatan. Dalam pengusulan program kegiatan dalam Renja 2022 dilakukan penyesuaian sehingga nama program dan kegiatan tidak sama dengan renja sebelumnya. Secara makro, usulan program yang diusulkan sejumlah 3 program, 12 kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan total usulan pagu anggaran sejumlah 7.402.993.000 rupiah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tanggal 28 Desember 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang melebur ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, sehingga pada DPPA tahun 2022 jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi 4 Program, 14 Kegiatan, dan 45 Sub Kegiatan. Adapun perubahan

yang terjadi yaitu adanya penambahan 1 Program yaitu, Program Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Selain itu terdapat pengurangan 4 sub kegiatan yang dibatalkan, yaitu sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta tercapainya indikator kinerja sesuai RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan, mengharuskan adanya perencanaan yang berkesinambungan melalui program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda. Untuk mendukung upaya tersebut, pada Perubahan Renja 2022, terdapat penyesuaian dimana terdapat penambahan 4 sub kegiatan baru, dengan rincian 3 sub kegiatan baru di Program Penelitian dan Pengembangan, dan 1 sub kegiatan baru di Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Terkait anggaran, terdapat 33 sub kegiatan yang berubah anggarannya.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan renja tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2022 serta telah diusulkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Secara lebih lengkap program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 mulai dari pagu penetapan serta pagu perubahan sebagaimana tersaji dalam Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 dan Perubahan Tahun 2022, sebagai berikut:

**TABEL 4.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022  
DAN PERUBAHAN TAHUN 2022**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			7,402,993,000		11,092,012,000		9,267,897,829
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3,368,000	3 dokumen	310,772,000	3 dokumen	322,772,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3,150,000	1 dokumen	2,415,000	1 dokumen	2,415,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3,141,000	1 dokumen	2,333,000	1 dokumen	2,333,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1,240,000	1 dokumen	930,000	1 dokumen	930,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,280,000	1 dokumen	960,000	1 dokumen	960,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 dokumen	6,772,000	13 dokumen	4,685,000	13 dokumen	4,685,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	4,864,431,000	12 laporan	7,457,651,000	12 laporan	5,439,031,723
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	19,095,000	12 dokumen	34,728,000	12 dokumen	36,738,801
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,507,000	1 laporan	1,274,000	1 laporan	1,274,000
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1,588,000	1 dokumen	1,243,000	1 dokumen	1,243,000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	8,207,000	12 paket	8,207,000	12 paket	10,850,000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	28,620,000	12 paket	31,320,000	12 paket	32,838,000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	10,555,000	12 paket	7,388,000	12 paket	7,823,000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 paket	3,360,000	12 paket	3,360,000	12 paket	4,080,000
15	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	14,843,000	12 paket	14,843,000	12 paket	14,843,000
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	2,376,000	6 laporan	2,376,000	6 laporan	2,376,000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90,618,000	12 laporan	147,328,000	12 laporan	172,438,000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>							

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Daerah</b>							
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	7,000,000	9 unit	109,435,000	12 unit	157,435,000
18	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah paket aset tak berwujud	0	0	0	0	1 paket	6,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12,029,000	12 laporan	9,041,000	12 laporan	11,053,000
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	82,800,000	12 laporan	82,800,000	12 laporan	79,800,000
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	195,884,000	12 laporan	199,277,000	12 laporan	231,544,139
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	114,555,000	18 unit (15 unit)	138,741,000	18 unit (15 unit)	174,241,000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	44,716,000	10 unit (9 unit)	44,716,000	10 unit	47,416,000
24	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3,000,000	3 Unit	3,000,000	3 Unit	3,000,000
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	53,765,000	11 unit	53,765,000	11 unit	56,523,000
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	59,719,000	2 unit	59,719,000	2 unit	59,719,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>							
27	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	15,332,000	1 Berita Acara (5 komponen)	27,884,000	1 Berita Acara (5 komponen)	27,884,000
28	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	7 Berita Acara	34,998,000	5 Berita Acara (7 BA)	96,079,000	5 Berita Acara (7 BA)	96,079,000
29	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	74,603,000	1 Berita Acara (5 komponen)	142,774,000	1 Berita Acara (5 komponen)	142,774,000
30	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	112,722,000	2 dokumen (28 OPD & 2 dokumen)	230,440,000	2 dokumen (28 OPD & 2 dokumen)	243,086,368
	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
31	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemetaan data dan informasi perencanaan pembangunan	1 dokumen	137,000,000	0	0	0	0
31	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 dokumen	62,000,000	2 dokumen	9,000,000	2 dokumen	15,000,000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							
32	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	29,000,000	4 Laporan (1 dokumen)	34,000,000	1 dokumen + 4 Laporan	20,000,000
32	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	19,500,000	0	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>							
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 dokumen	78,300,000	5 dokumen	86,120,000	5 dokumen	58,600,000
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 dokumen	183,000,000	6 dokumen	160,862,000	6 dokumen	130,498,368
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmoinsasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Sinergitas dan Harmoinsasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 dokumen	161,000,000	0	0	0	0
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>							
35	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 dokumen	74,707,000	4 dokumen	23,600,000	4 dokumen	22,018,000
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 dokumen	369,150,000	6 dokumen	281,152,000	6 dokumen	291,106,384
37	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 dokumen	94,590,000	6 dokumen	126,990,000	6 dokumen	130,998,000
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>							

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 dokumen	227,644,000	9 dokumen	422,803,000	6 dokumen	422,606,692
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 dokumen	91,828,000	0	0	0	0
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>							
39	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 dokumen	0	3 dokumen	96,721,000	3 dokumen	91,041,000
40	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen	0	1 dokumen	8,105,000	1 dokumen	8,105,000
41	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 rekomendasi	0	1 rekomendasi	42,948,000	1 rekomendasi	42,948,000
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	0	-	0	-	74,534,000
	Penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	-	-	0	-	0	-	50,000,000
	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>							
42	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	0	2 dokumen	205,661,000	2 dokumen	181,430,000

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET 2022	RENJA 2022	TARGET APBD	APBD 2022	TARGET RENJA P	RENJA P 2022
				Rp.		Rp.		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	0	1 laporan	219,872,000	1 laporan	192,195,677
44	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 laporan	0	3 laporan	81,914,000	3 laporan	64,583,000
45	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 laporan	0	2 laporan	62,780,000	2 laporan	58,368,677
46	Fasilitasi Hak Kekeyaan Intelektual	-	-	0	-	0	1 laporan	19,680,000
				7,402,993,000		11,092,012,000		9,267,897,829

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2022 selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2022. Tujuan penyusunan Perubahan Renja OPD dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2022 serta mengacu pada perencanaan tahun pertama Renstra OPD.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja OPD Tahun 2022 direncanakan pada Bulan September 2022, maka upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas terus dilakukan untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Diharapkan semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renstra namun tidak tercantum dalam renja dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, indikator kinerja telah tercapai pada tahun sebelumnya, adanya penyesuaian nama program dan kegiatan demi keselarasan indikator kinerja maupun perubahan jadwal rencana pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang tercantum dalam Renja namun tidak terdapat dalam Renstra dimungkinkan dengan kriteria dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan serta capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan belum terpenuhi.

Disamping itu dengan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan Semester I. Sehingga capaian

kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Perubahan Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.